

BAB I

Pendahuluan

I.I Latar Belakang

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 aline ke 4 menyebutkan tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia pada dasarnya adalah berupaya mewujudkan masyarakat adil makmur, sejahtera lahir dan batin. Tujuan ini dapat tercapai melalui pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang tersebut, membutuhkan biaya atau dana. Salah satu sumber biaya bagi pelaksanaan pembangunan melalui pemungutan pajak. Oleh sebab itu pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara merupakan suatu keniscayaan yang akan sangat membantu terwujudnya tujuan negara Indonesia. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta rakyat dalam praktik kenegaraan.¹

Indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin

¹Etty Muyassaroh, *Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik NPWP*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013. Hlm.1

tersedianya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara.²

Pelayanan yang optimal untuk kepuasan masyarakat merupakan visi samsat Sleman yang diterjemahkan dalam misinya yaitu :

- a. meningkatkan kinerja seluruh pegawai samsat untuk menunjang kualitas layanan bagi masyarakat,
- b. meningkatkan mutu pelayanan untuk meningkatkan pendapatan daerah,
- c. meningkatkan secara terus menerus pengetahuan, ketrampilan dan sikap pegawai serta
- d. memberikan pelayanan yang memuaskan bagi semua pelanggan internal dan eksternal.

Kantor Bersama Samsat Sleman seperti satuan kerja pemerintah daerah lain harus senantiasa memperbaiki citra pelayanan. Pelayanan dalam pemungutan pajak harus mempertimbangkan kepuasan wajib pajak dalam menerima pelayanan. Petugas pelayanan diharapkan selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangan teknologi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dalam kegiatan pelayanan administrasi kendaraan bermotor, keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan petugas pelayanan perlu diperhartikan. Keseimbangan

² Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco 1992. hlm 1.

mengenai hak dan kewajiban akan mendukung proses pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik.

Perguruan tinggi di DIY berada di wilayah Sleman sehingga mobilitas kendaraan bermotor sangat tinggi. Selain itu, pencairan kredit kendaraan bermotor yang dijamin oleh lembaga leasing dengan proses sederhana mendorong masyarakat untuk melakukan kredit sehingga meningkatkan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Sleman.

Peningkatan jumlah pemilik kendaraan bermotor mengindikasikan kesejahteraan masyarakat dan mobilitas yang tinggi. Kabupaten Sleman menjadi pemilik kendaraan bermotor terbanyak. Di wilayah Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 46.774 unit kendaraan baru terdiri 40.889 unit kendaraan roda dua dan 5.855 unit kendaraan roda empat.

Kesejahteraan masyarakat yang meningkat mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor di wilayah Sleman. Sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Penganggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) bahwa dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Sleman rata-rata sebesar 45 ribu unit setiap tahunnya (Tribunnews, 12 Januari 2012). Kepadatan pelayanan tidak dapat dihindarkan karena jumlah kendaraan bermotor yang besar

secara otomatis akan meningkatkan jumlah pelayanan yang berlangsung di Samsat Sleman.³

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman ?
2. Apa dampak penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

I.4 Manfaat Penelitian

³Ghozaly, Strategi Pelayanan Samsat Sleman terhadap Wajib Pajak.
<file:///C:/Users/ghozaly/Documents/bab%20I-V%20samsat%20sleman.pdf> diakses pada tanggal 29 oktober 2015, pukul 21.30 WIB

1. Manfaat praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak dibidang perpajakan, sehingga masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak.
2. Manfaat teoritis : Penelitian ini diharapkan agar mahasiswa bisa memahami atau mendalami ilmu hukum , khususnya ilmu hukum pajak